Tafsir Pendidikan Perempuan Menurut Qasim Amin

Elya Munfarida

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara,
Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126
Email: elya@iainpurwokerto.com

Abstract

The encounter between Arab Islam and colonialism and modernity resulted in a revival of Arab Islamic intellectuals with an orientation to reinterpret the Islamic tradition. Qasim Amin as one of the Nahdah figures tries to reinterpret Islamic teachings and traditions, especially those related to women, by accommodating modern ideas and culture. Based on his criticism of the reality of the restriction and subordination of women in the public sphere, Amin tries to reinterpret women's education in Egypt by re-exploring the texts of the Koran and hadiths that talk about women's rights and obligations, the interpretations of the scholars of the two texts, the values and basic principles of Islamic shari'ah that underlie Islamic legislation, as well as sociological theories and liberal feminist thinking. According to Amin, women's education is very significant with three interests, namely society in the form of participation in various fields in the public sphere, the family in the form of the ability to be able to better protect their children, and the state in the form of producing offspring with good intellectual and moral qualities that have an impact on the progress of the country. The realm of education that must be accessed by women includes intellectual, moral, and physical education.

Keywords: Tafsir, Education, Women

Abstrak

Perjumpaan Arab Islam dengan kolonialisme dan modernitas menghasilkan kebangkitan intelektual Arab Islam dengan orientasi melakukan reinterpretasi tradisi Islam. Qasim Amin sebagai salah satu tokoh *nahdah* berusaha menafsirkan kembali ajaran dan tradisi Islam, terutama yang terkait dengan perempuan, dengan mengakomodasi ide dan kultur modern. Berbasis pada kritiknya terhadap realitas restriksi dan subordinasi perempuan di ruang publik, Amin berusaha untuk mereinterpretasi pendidikan perempuan di Mesir dengan menggali kembali teks-teks al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang hak dan kewajiban perempuan, penafsiran para ulama terhadap kedua teks tersebut, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dari syari'at Islam yang melandasi legislasi Islam, serta teori-teori sosiologis dan pemikiran feminisme liberal. Menurut Amin, pendidikan perempuan sangat signifikan dengan tiga kepentingan yakni masyarakat berupa partisipasi dalam berbagai bidang di ranah publik, keluarga berupa kemampuan untuk dapat lebih memproteksi anak-anaknya, dan negara berupa menghasilkan keturunan dengan kualitas intelektual dan moral bagus yang berdampak pada kemajuan negara. Ranah pendidikan

yang harus bisa diakses perempuan meliputi pendidikan akal, akhlak dan jasmani.

Kata Kunci: Tafsir, Pendidikan, Perempuan

A. PENDAHULUAN

Perjumpaan Islam Timur dan Barat dengan ide-ide westernisasi dan modernitas memunculkan beragam respon di kalangan umat Islam. Beragam respon ini, di sisi lain, menampilkan beragam krisis yang dialami dunia Arab baik dalam ranah intelektual, sosial dan religius yang mendorong para intelektual untuk mensintesis tradisi Islam dengan modernitas dan berbagai produk ide dan pemikirannya. Kontinuitas epistemik ini dimanifestasikan dalam tiga konsep yang merepresentasikan kemajuan pemikiran Arab pada awal abad 19 sampai sekarang. Ketiga konsep tersebut adalah *nahdah* (renaisans) yang berupaya memelihara dan merevitalisasi eksistensi nalar Islam dengan menegaskan kontinuitas dengan tradisi lama dan sekaligus juga melakukan akomodasi terhadap referensi Barat; *thawrah* (revolusi) yang menunjuk pada kemunculan negara bangsa untuk meresistensi dominasi politik dan ekonomi Barat; dan *'awdah* (kembali ke asal) yang berupaya mentransliterasikan Islam sebagai sebuah ideologi politis yang menunjukkan adanya konfrontasi antara status quo dari kalangan sekuler dan militer dengan gerakan-gerakan Islamis yang membawa banner "*true religion*" (Abu-Rabi, 1996, p. 9).

Di antara ketiga konsep gerakan di atas, *nahdah* merupakan bentuk kebangkitan yang bersifat eklektis yang meminjam sumber-sumber Barat dalam merekonstruksi tradisi Islam. Meski sikap ini terkadang melahirkan sikap ambivalen terkait dengan penerimaan terhadap modernitas dan penolakan terhadap ide-ide westernisasi, namun penilaian tersebut tidak dapat digeneralisasi, karena ada juga respon intelektual Arab yang juga menerima ide-ide westernisasi, seperti kesetaraan dan emansipasi perempuan, untuk memaknai kembali tradisi Islam tentang perempuan.

Dalam konteks ini, Qasim Amin justru memanfaatkan teori-teori Barat terutama feminisme liberal untuk mengafirmasi kesetaraan dan hak-hak publik perempuan dengan tetap berpijak pada tradisi Islam. Beberapa karyanya, terutama *Tahrir al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-Jadidah*, menunjukkan posisi Qasim Amin sebagai salah satu eksponen gerakan renaissans Arab Islam terutama dalam hal pembelaan terhadap kebebasan dan hak-hak perempuan baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Qasim Amin sangat menentang eksklusi perempuan dengan argumentasi bahwa kedua praktek tersebut tidak terdapat dalam hukum Islam dan justru akan menjatuhkan peradaban Islam di hadapan peradaban Barat. Selain itu, dengan merujuk pada tradisi Barat, perempuan tetap dapat berkiper di ruang publik tanpa direstriksi oleh batasan-

batasan tradisi dan agama. Pemikirannya ini tentu saja menimbulkan reaksi keras di kalangan para hakim yang masih memegang ortodoksi Islam yang cenderung berpegang pada pembatasan ruang publik perempuan.

Perhatiannya yang besar terhadap persoalan-persoalan perempuan tersebut, menjadikan Qasim Amin disebut sebagai pioner munculnya feminisme Islam (Bardan, 2009).¹ Hal ini menunjukkan peran yang signifikan yang diperankan oleh Qasim Amin dalam diskursus feminisme Islam yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan wacana feminisme di Arab khususnya maupun di dunia Islam pada umumnya. Ini yang kemudian memunculkan banyaknya kajian-kajian yang memberikan perhatian utamanya pada pemikiran feminis Qasim Amin. Hanya saja, menurut peneliti, kajian-kajian yang ada kurang mengapresiasi mekanisme yang digunakan Qasim Amin untuk menginterpretasikan tradisi Islam, baik berupa pemikiran-pemikiran para ulama terdahulu maupun teks al-Qur'an dan hadis. Padahal justru dari teks-teks tersebut, terutama al-Qur'an, dia melihat adanya nilai-nilai yang justru mengafirmasi kesetaraan gender dan keharusan memberikan kebebasan dan hak-hak perempuan. Dengan menggunakan mekanisme interpretasi tertentu, Qasim Amin dapat menderivasikan nilai-nilai moral universal dari al-Qur'an yang kemudian dijadikan basis legitimasi teologis akan persamaan, kesetaraan dan keadilan gender. Tidak adanya concern terhadap poin yang fundamental ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji mekanisme interpretasi Qasim Amin yang terefleksikan dalam interpretasinya tentang pendidikan perempuan.

B. HISTORISITAS PEMIKIRAN QASIM AMIN

Realitas kolonialisme dan imperialisme di satu sisi menimbulkan adanya eksploitasi dan penundukan kolonial terhadap rakyat pribumi, namun di sisi lain juga melahirkan kelompok menengah elit baru terdidik yang selanjutnya berperan melakukan perubahan dan transformasi baik dalam aspek ekonomi, social, politik, budaya dan agama. Perannya ini cukup signifikan sehingga tidak hanya semata-mata dipandang sebagai instrumen politik kolonialisme untuk melakukan penetrasi secara cultural terhadap koloni, namun justru menjadi kelas yang mendorong adanya reinterpretasi atas tradisi dan kondisi masyarakatnya dengan perspektif yang berbeda.

Kecenderungan ini juga yang terjadi di Mesir ketika mengalami kolonialisme. Beberapa kalangan elit terdidik muncul dan mendapatkan akses untuk menempuh

¹ Dalam salah satu artikelnya, Margot Bardan menganggap Qasim Amin sebagai penggagas feminisme Islam, karena dalam beberapa karyanya ia membangun argumentasi yang komprehensif untuk menegaskan kesetaraan gender dan kebebasan perempuan baik di ruang domestik maupun di ruang publik.

melanjutkan pendidikan di Inggris dengan karakter dan konten yang berbeda dengan pendidikan lokal Mesir. Salah satu tokoh *colonial encounterings* di Mesir adalah Qasim Amin, yang disebut oleh beberapa intelektual sebagai bapak feminisme Arab. Kebanyakan studi yang mengkaji tentang gerakan reformasi di Arab dan Mesir khususnya serta kajian tentang perempuan di Arab dan terutama Mesir, pasti akan menyebutkan nama Qasim Amin sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam gerakan reformasi Mesir (gerakan *nahdah*).

Qasim Amin lahir di Alexandria tanggal 1 Desember 1863 dari kalangan aristokrat Turki Usmani. Ayahnya, Muhammed Bey Amin Khan, adalah seorang gubernur Kurdistan sebelum ia pindah dengan keluarganya ke Alexandria Mesir, tempat Amin lahir. Di Mesir, ayahnya bekerja sebagai komandan pasukan Khedive Ali Pasha. Ia juga menguasai beberapa tanah feodal yang luas di Alexandria dan Mesir. Sementara ibunya adalah putri Akhmad Bey Khattab, salah satu anggota keluarga Muhammad Ali Pasha. Qasim tercatat sebagai keturunan Bey baik secara paternal maupun maternal (Imarah, 1977).

Sebagai keturunan aristocrat, Amin dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang prestisius di Mesir. Pendidikan dasar ditempuh di Alexandria, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan persiapan di Kairo pada tahun 1875. Kurikulum yang dipakai di kedua sekolah tersebut adalah kurikulum yang sudah diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan di Eropa. Pada tahun 1881, dia memperoleh gelar sarjana hukum dari sekolah Khedival dan menjadi salah satu murid yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk meneruskan pendidikannya di University de Montpellier di Perancis yang ditempuh selama empat tahun (Mazid, n.d., p. 53).

Setelah selesai menempuh pendidikannya, Amin menjadi bagian dari kelas pegawai kerajaan. Pada tahun 1885, dia menjadi anggota juri di pengadilan campuran, sebuah system peradilan yang dipengaruhi oleh system Barat. System ini, yang dibentuk 10 tahun sebelum penunjukan Amin, diciptakan dengan mengkombinasikan system peradilan Napoleonik dan hukum Islam. Oleh karena itu, anggota tidak hanya berasal dari kalangan Islam, Mesir, tapi juga dari Barat seperti Inggris, Austria, Jerman dan Perancis yang justru mendominasi dalam menentukan juri-juri lokalnya. Selanjutnya, karir Amin semakin sukses di lembaga peradilan ini, yang kemudian mengantarkannya bekerja di kantor pemerintah Mesir bagian persoalan-persoalan hukum. Pada tahun 1889, ia ditunjuk sebagai hakim Mesir di pengadilan nasional (Mazid, n.d., p. 53).

Dengan latar belakang pendidikan di lembaga yang dipengaruhi atau menggunakan kurikulum Barat serta karier di instansi yang diintervensi oleh pengaruh dan hukum Barat, tentu sangat mempengaruhi epistemologi pemikiran Amin. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa Barat seharusnya dijadikan sebagai model

yang harus diikuti oleh masyarakat Mesir agar bisa mencapai kemajuan seperti yang dialami oleh negara-negara Barat. Berbagai aturan dan tradisi Barat perlu diimitasi sehingga bangsa dan masyarakat Mesir bisa menjadi bangsa dan masyarakat yang maju dan beradab dan pada gilirannya menjadi bangsa yang dominan dan superior.

Kecenderungan orientalis ini juga mempengaruhi kesadaran Amin yang dimanifestasikan dalam pemikiran-pemikirannya yang berorientasi Barat. Kemajuan Mesir bisa terwujud hanya jika mereka mengikuti langkah-langkah Barat yang progresif. Berbagai lembaga yang ada harus direformasi dan direstrukturisasi sesuai dengan standar institusi-institusi Barat. Dengan merujuk pada teori *survival* Darwin, Amin berpandangan bahwa jika masyarakat Mesir tidak melakukan modernisasi seperti yang dilakukan oleh Eropa, maka mereka tidak akan mampu bersaing dengan Barat dan apalagi bertahan atau bahkan bisa tenggelam atau hilang (*the fittest the survival*)(Mazid, n.d., p. 53).

Dalam konteks reformasi ini, ia terlibat secara aktif di pengadilan campuran dan nasional dan bertugas menjadi hakim di pengadilan nasional dengan integrasi hukum Barat dan hukum Islam. Di samping itu, ia juga menekankan signifikansi emansipasi perempuan di ruang publik dalam bentuk akses pendidikan. Dengan akses ini, perempuan dapat meningkatkan kualitasnya dan memberikan pengaruh positif bagi progresifitas masyarakat dan negara. Dengan mengkomparasikan dengan perempuan di Barat yang memiliki kebebasan beraktivitas di ruang public, Amin memandang adanya korelasi positif antara kemajuan negara dengan partisipasi perempuan. Di samping itu, kalau perempuan terdidik, maka mereka bisa menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan pada gilirannya akan menciptakan masa depan negara yang lebih maju seperti yang dialami Barat(Amin, t.t, p. 64).

Dengan menekankan signifikansi dari partisipasi perempuan seperti yang dialami perempuan di Barat, Amin mengkritik penggunaan jilbab yang berlebihan (*niqab*) dengan menutup tubuh perempuan secara keseluruhan. Model jilbab tersebut justru dipandang Amin sebagai seklusi perempuan sehingga perempuan tidak dapat bergerak bebas di ruang publik dan sebaliknya hanya mengurus masalah-masalah dalam ranah domestik. Keadaan ini justru akan membuat perempuan malas dan kehilangan kapasitas untuk mendidik anak yang memiliki nilai moral yang tinggi. Di samping itu, perempuan juga tidak dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap penguatan dasar pengetahuan dan masalah-maslah publik. Dengan mengkomparasikan realitas perempuan di Barat, Amin menyatakan bahwa perempuan di Barat ikut berpartisipasi secara aktif bersama dengan laki-laki dalam beragam aspek kehidupan yang bersifat publik, seperti dalam pengetahuan, industri, perdagangan, dan lain-lain(Amin, t.t, p. 43).

Beberapa pemikiran Amin di atas secara sekilas menunjukkan pengaruh Barat yang kuat dalam konstruksi pemikirannya sehingga Barat dijadikannya sebagai referensi untuk mencapai progresifitas. Inferioritas Mesir (Timur) hanya dapat dihilangkan dengan cara-cara yang ditempuh dan dilakukan oleh Barat sebagai model rujukan. Dengan pemaknaan ini, Amin tampaknya melakukan reproduksi dan reartikulasi visi kolonialisme dan imperialisme dalam rangka menjadikan Timur sebagai subyek yang beradab (*civilized*). Oleh karenanya, Ahmed mengkritik pemikiran-pemikiran Amin tentang perempuan sebagai mimikri colonial (Ahmed, 1992, pp. 167–168).

Pandangan Ahmed ini dikritik Mazid karena pemikiran Amin terutama tentang perempuan justru memperlihatkan tendensi yang lebih kompleks dari sekedar memandangnya sebagai reproduksi kolonialisme. Meskipun Amin memakai perspektif Barat, namun ia tetap menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai basis pemikirannya. Dengan asumsi pengembangan pemikiran modernis Muhammad Abduh, Amin berusaha untuk melakukan integrasi pemikiran Barat dan ajaran-ajaran Islam (Hourani, 1993, p. 166).

Dengan demikian, pemikiran dan modernitas yang dibawa oleh kolonialisme tidak direproduksi secara tekstual oleh intelektual Muslim, tapi juga dilakukan rekonstruksi dalam kerangka pikir Islam. Dalam proses ini, ada beberapa hal yang signifikan berlangsung. Pertama, seperti disinggung oleh para intelektual di atas, pemikiran-pemikiran modern memberikan perspektif baru dalam memandang tradisi dan ajaran-ajaran agama, sehingga banyak tradisi dan aturan-aturan agama yang kemudian dikritik karena dipandang tidak progresif dan diskriminatif. Kedua, adanya reinterpretasi ajaran dan tradisi Islam dengan perspektif baru yakni modernitas. Ketiga, adanya proses apropriasi, meminjam istilah Paul Ricoeur (Ricoeur, 1982), modernitas dalam tradisi Islam, yang berarti ide-ide modernitas diadopsi dan direkonstruksi dalam perspektif Islam. Interpretasi yang dihasilkan pada gilirannya merupakan produksi makna baru yang disesuaikan dengan konteks dan problem yang dihadapi.

Berdasarkan background di Barat, Amin mengkritik beragam praktek sosial yang subordinatif terhadap perempuan dan melakukan dekonstruksi terhadap praktik-praktik yang bias dan opresif terhadap perempuan. Praktik-praktik tersebut dianggap kontradiksi dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti yang dialaminya di lingkungan Barat. Keduanya dapat memperoleh kesetaraan baik dalam akses pendidikan maupun dalam partisipasi di ruang publik. Keterlibatan keduanya justru akan mendorong kemajuan karena adanya akan menjadi jaminan bagi kesejahteraan ekonomi dan social warganya.

Kritiknya ini juga merupakan konsekuensi logis dari afirmasi Amin terhadap pendidikan perempuan. Amin menyatakan bahwa, "*education would end the tyranny,*

and in doing so it would also end the veiling and seclusion of women". Dengan memberikan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat di ruang publik, yakni menempuh pendidikan dan melakukan profesi-profesi publik, maka penggunaan hijab yang berlebihan menjadi dipersoalkan karena dapat mengganggu aktivitas dan kebebasan perempuan.

Untuk mengatasi persoalan perempuan di Mesir Amin berupaya untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama dan pandangan para ulama untuk mencari nilai-nilai yang bisa dijadikan pendasaran teologis untuk melakukan reformasi sosialnya. Dalam konteks ini, ia menemukan bahwa Islam memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan baik dalam ranah agama maupun duniawi. Sementara itu, pandangan yang cenderung mensubordinasikan perempuan dianggap bukan berasal dari syari'at Islam, tapi lebih sebagai pandangan subyektif dari luar (tradisi) yang diatributkan pada Islam.

C. TAFSIR TENTANG PENDIDIKAN PEREMPUAN

Pendidikan bagi perempuan penting dalam rangka memenuhi dua kepentingan yakni masyarakat dan keluarga. Dalam konteks masyarakat, dengan pendidikan perempuan Mesir dapat meningkatkan pengetahuan dan intelektualitasnya sehingga bisa berpartisipasi dalam lingkup social seperti yang dilakukan oleh perempuan di Barat yang juga terlibat aktif dalam perdagangan, pekerjaan, seni, dan lain-lain(Amin, t.t, p. 43). Oleh karena itu, partisipasi publik perempuan penting agar bersama-sama laki-laki dapat membangun masyarakat yang berkualitas sehingga bisa mencapai kemajuan seperti yang sudah dilakukan dan dicapai oleh masyarakat Barat.

Lebih lanjut, Amin menegaskan bahwa secara mendasar, hak pendidikan bagi perempuan adalah karena perempuan seperti juga laki-laki adalah manusia yang berakal dan memiliki kehendak(Amin, t.t, p. 44). Dengan pendidikan, kemampuan akal dan intelektualitas perempuan bisa direalisasikan dan dikembangkan sehingga dapat berkontribusi terhadap berbagai bidang dalam masyarakat. Amin tidak melakukan pembedaan kualitas atau kapasitas akal/rasio antara laki-laki dan perempuan, seperti yang biasa dipegang oleh kelompok tradisional. Dengan kesamaan potensi rasional ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk merealisasikan potensi tersebut melalui pendidikan.

Kehendak bebas yang dimiliki perempuan juga merupakan potensi positif bagi pengembangan kemanusiaan perempuan. Dengan kehendak bebas dan didukung oleh akal, maka perempuan dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ini merespon realitas perempuan yang tidak selalu memiliki wali, belum menikah atau yang menjadi single parent baik karena cerai maupun ditinggal mati suaminya, sehingga dengan

kondisi kesendiriannya ia tetap dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya jika ia mendapatkan akses pendidikan yang layak(Amin, t.t, p. 44).

Selain itu, secara normatif dan teologis menurut hukum positif dan syari'at Ilahiyyah, keduanya memberikan ketetapan bagi perempuan sama seperti laki-laki dalam beraktivitas dan mengaktualisasikan dirinya, sehingga bidang-bidang sosial seperti seni, profesi, inovasi, filsafat, memberikan perhatian yang sama bagi laki-laki dan perempuan(Amin, t.t, pp. 46–47). Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal hak untuk mengembangkan bidang-bidang tersebut. Hal ini bermakna bahwa ruang publik tidak menjadi monopoli hak privilese laki-laki saja, namun perempuan juga memiliki hak yang setara untuk mengembangkan potensinya baik potensi rasional maupun kehendak bebasnya dalam bidang-bidang publik.

Signifikansi pendidikan bagi perempuan juga ditekankan oleh Amin karena memiliki fungsi ekonomis. Kalau perempuan memiliki wali atau yang menanggung hidupnya, maka segala kebutuhannya bisa dipenuhi tapi dalam kenyataannya banyak perempuan yang harus menanggung hidupnya dan keluarganya sehingga harus bekerja di ruang publik untuk memenuhi kebutuhannya(Amin, t.t, pp. 43–44). Akses pendidikan yang didapatkan perempuan bisa meningkatkan kemandiriannya secara ekonomis, sehingga mengurangi ketergantungannya kepada orang lain, apalagi ketika ia berperan sebagai *single parent* atau tidak memiliki wali.

Dengan demikian, ilmu merupakan instrumen bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan material dan immaterial (ruhani)(Amin, t.t, p. 46). Secara material, ilmu dapat memberikan kebahagiaan di dunia karena orang yang berpendidikan memiliki akses dan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang prospektif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sementara secara spiritual, ilmu dapat meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama, sehingga bisa memberikan ketenangan dalam hidup. Dalam pengertian ini, Amin meyakini bahwa ilmu adalah satu-satunya sarana yang dapat meningkatkan posisi dan kualitas manusia(Amin, t.t, p. 46).

Sementara fungsi pendidikan bagi perempuan yang kedua adalah keluarga. Dengan pendidikan, perempuan memiliki kemampuan lebih untuk memproteksi keluarga dan anak-anaknya, yakni dengan memberikan menanamkan nilai-nilai moral dan memberi teladan yang baik bagi keluarga dan anak-anaknya. Dengan fungsi ini, maka anak-anak yang dididik akan menjadi anak-anak yang memiliki kualitas moral dan perilaku yang baik. Sebaliknya kalau ibunya tidak berpendidikan, maka akan tercipta anak yang bodoh, “akalnya sedikit, nafsunya besar”(Amin, t.t, p. 64).

Pandangan Amin ini berbasis pada interpretasinya terhadap ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا....

“Wahai orang-orang yang beriman! Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka...” (QS. At-Tahrim [66]:6)(Departemen Agama, 2000, p. 1063).

Merujuk pada pernyataan di atas, maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia, dalam hal ini perempuan, untuk bisa menjalankan fungsi proteksi keturunan adalah melalui pendidikan. Semakin perempuan memiliki kualitas pendidikan yang baik, semakin baik juga kualitas keturunan yang dihasilkan dan lebih berhasil dalam menjaga keturunannya dari api neraka.

Lebih lanjut, Amin menegaskan bahwa jika perempuan itu shalihah, maka ilmu yang mereka miliki akan memberikan kebaikan baik secara personal maupun sosial. Sebaliknya, jika perempuan itu tidak baik, maka ilmu yang dimilikinya akan menciptakan keburukan(Amin, t.t, p. 73). Pernyataan ini menunjukkan bahwa ilmu memberikan efek positif terhadap manusia terlepas dari kualitas moralnya. Kesimpulan ini diderivasikan dari firman Allah QS. Al-Baqarah: 26 yang berbunyi:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Artinya: “Dengan (perumpamaan) itu, banyak orang yang dibiarkan-Nya tersesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik”(Departemen Agama, 2000, p. 7).

Pandangan di atas menegaskan kembali bahwa pendidikan itu tidak akan menimbulkan dampak dan efek buruk bagi yang memilikinya, bahkan justru sebaliknya memberikan pengaruh positif. Terkait dengan ini, Amin menjelaskan bahwa perempuan yang berilmu selalu mempertimbangkan segala sesuatu secara mendalam dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Kondisi inilah yang dialami oleh perempuan Perancis secara umum yang bisa menjaga penampilannya dan memiliki hubungan yang harmonis di antara laki-laki dan perempuan(Amin, t.t, p. 73).

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh ilmu yang dimilikinya. Orang yang berpendidikan akan memiliki perilaku dan moralitas yang baik dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Amin menyimpulkan bahwa “pendidikan akal dan akhlak akan menjaga perempuan ... (karena) mereka akan mengetahui nilai dari kemuliaan dan cara untuk menjaga kemuliaan tersebut.”(Amin, t.t, p. 76).

Terkait dengan pernyataan di atas, Amin menekankan pentingnya pendidikan akal dan akhlak secara seimbang. Dengan pendidikan akhlak, perempuan yang berakhlak baik dipandang lebih bermanfaat daripada laki-laki yang baik, karena moralitasnya akan ditularkan kepada anak-anaknya sebagai generasi masa depan(Amin, 1900, p. 159). Sementara pendidikan akal artinya mempelajari semua ilmu, seni, dan segala hal yang

membantu manusia untuk melihat kondisi dari berbagai fenomena yang ada (Amin, 1900, p. 160).

Selain kedua ranah pendidikan di atas, dalam *Al-Mar'ah al-Jadidah*, Amin menambahkan pentingnya pendidikan jasmani bagi perempuan sebagaimana juga penting bagi laki-laki. Pendidikan ini signifikan agar perempuan bisa menjaga kesehatan jasmaninya sehingga bisa menjalankan semua perannya baik di dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, dengan adanya ranah pendidikan ini perempuan juga memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anaknya, sehingga mereka memiliki kualitas hidup yang baik yang akan mempengaruhi kualitas intelektualnya (Amin, 1900, pp. 167–168).

Secara makro, peran perempuan yang terdidik tidak hanya signifikan dalam wilayah keluarga atau masyarakat, namun lebih jauh akan menentukan kualitas dan masa depan bangsa. Kalau perempuan terdidik maka keturunan atau anak-anaknya pun akan memiliki kualitas intelektual dan moral yang bagus. Hal ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi kualitas bangsa, karena generasinya memiliki kapasitas yang bagus. Bangsa Mesir akan mencapai kemajuan seperti yang dialami bangsa-bangsa Barat kalau para perempuannya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya.

Berbasis pada nilai moral kesetaraan manusia universal, maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya baik yang bersifat transendental maupun profan. Terkait dengan kondisi perempuan di Mesir yang mengalami diskriminasi, maka perempuan berhak untuk mendapatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan agama maupun umum.

Akses pendidikan ini sangat signifikan tidak hanya secara personal tapi juga secara sosial. Secara personal, pendidikan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi perempuan sehingga mengetahui lebih banyak tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya atau di dunia. Hal ini akan bermanfaat bagi perempuan, sehingga dengan ilmunya perempuan dapat melakukan peran-perannya secara maksimal. Selain itu, dengan pendidikan, perempuan bisa meningkatkan kemampuannya ekonomisnya, karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki korelasi positif dengan tingkat kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Ini terutama urgen, menurut Amin, bagi perempuan yang tidak memiliki wali atau suami sehingga harus menanggung beban kebutuhannya dan keluarganya sendiri.

Sementara secara sosial, pendidikan perempuan akan meningkatkan kualitas intelektual perempuan sehingga ketika terjun dan terlibat di dunia publik, eksistensinya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan kualitas masyarakat. Dalam

konteks ini, Amin menekankan bahwa perempuan yang terdidik akan menghasilkan keturunan yang lebih baik daripada perempuan yang tidak terdidik. Kalau keturunannya berkualitas, sementara anak-anak adalah generasi masa depan bangsa, maka kualitas bangsa pun juga menjadi lebih baik. Dalam hal ini, bagi Amin, peran perempuan bagi kemajuan negara tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan mungkin lebih penting daripada laki-laki.

Dengan memberikan akses pendidikan yang sama bagi perempuan, maka umat Islam telah menjalankan beberapa hal yang termasuk dalam tujuan syari'at Islam, yakni proteksi akal, proteksi keturunan dan proteksi lingkungan. Dengan pendidikan, akal perempuan bisa terus diasah sehingga memiliki intelektualitas yang bagus. Sementara terkait dengan proteksi keturunan, perempuan yang memiliki pendidikan yang baik akan mentransfer dan menginternalisasikan ilmunya kepada anak-anaknya sehingga memiliki kualitas intelektual dan moral yang baik. Sementara dengan proteksi lingkungan, perempuan yang terdidik akan memberikan pengaruh positif bagi terciptanya masyarakat dan negara yang maju.

D. SIMPULAN

Dalam melakukan interpretasi tentang pendidikan perempuan, Amin berpijak pada kondisi perempuan Mesir yang mengalami subordinasi karena tidak mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki dan adanya praktik niqab yang membatasi akses perempuan di ruang public. Dari realitas ini, kemudian ia mencoba mencari teks-teks al-Qur'an yang dalam banyak tempat mengafirmasi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nilai moral tentang kesetaraan ini kemudian dijadikan landasan untuk melakukan pembebasan perempuan berupa keharusan pendidikan bagi perempuan dan penggunaan hijab syar'I yang tidak membatasi dan menghalangi partisipasi public perempuan.

Pendidikan bagi perempuan penting dalam rangka memenuhi tiga kepentingan yakni masyarakat, keluarga dan negara. Dalam konteks masyarakat, dengan pendidikan perempuan Mesir dapat meningkatkan pengetahuan dan intelektualitasnya sehingga bisa berpartisipasi dalam lingkup social seperti yang dilakukan oleh perempuan di Barat yang juga terlibat aktif dalam perdagangan, pekerjaan, seni, dan lain-lain. Sementara fungsi pendidikan bagi perempuan yang kedua adalah keluarga. Dengan pendidikan, perempuan memiliki kemampuan lebih untuk memproteksi keluarga dan anak-anaknya, yakni dengan memberikan menanamkan nilai-nilai moral dan memberi teladan yang baik bagi keluarga dan anak-anaknya. Dalam konteks negara, perempuan yang terdidik akan menghasilkan keturunan dengan kualitas intelektual dan moral bagus yang berpengaruh terhadap kualitas dan kemajuan bangsa.

Ranah pendidikan yang harus bisa diakses perempuan meliputi pendidikan akal, akhlak dan jasmani. Dengan pendidikan akhlak, perempuan yang berakhlak baik dipandang lebih bermanfaat daripada laki-laki yang baik, karena moralitasnya akan ditularkan kepada anak-anaknya sebagai generasi masa depan. Sementara pendidikan akal berarti mempelajari semua ilmu, seni, dan segala hal yang membantu manusia untuk melihat kondisi dari berbagai fenomena yang ada. Sementara dengan pendidikan jasmani, perempuan dapat menjaga kesehatan jasmaninya sehingga bisa menjalankan semua perannya baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Rabi, I. (1996). *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World*. State University of New York Press.
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Amin. (1900). *Al-Mar'ah al-Jadidah*. t.p.
- Amin, Q. (t.t). *Tahrir al-Mar'ah*. Dar al-Ma'arif.
- Bardan, M. (2009). "Women, Qasim Amin, and the Rise of Feminism", dalam *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld.
- Departemen Agama. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. UD. Mekar Surabaya.
- Hourani, A. (1993). *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*. Cambridge University Press.
- 'Imarah, M. (1977). *Qasim Amin, al-A'mal al-Kamilah*. Dar al-Syuruq.
- Mazid, N. (n.d.). *Western Mimicry or Cultural Hybridity: Deconstructing Qasim Amin's "Decolonized Voice"*. 19(4).
- Ricoeur, P. (1982). *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*. Cambridge University Press.